

Bab II

Hikayat Perang Sabil: **Relasi Gender dan Konstruksi Nasionalisme berlandaskan Islam di Aceh**

Bukti-bukti yang tersebar menunjukkan bahwa sebelum akhir abad ke-19, perempuan Aceh memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan (mereka menduduki posisi sebagai ratu, perdana menteri, dan kepala daerah otonom yang disebut *ullebalang*) dan dalam perang melawan bangsa-bangsa Eropa (laksamana, genderal, dan prajurit). Peperangan itu sendiri mulanya melawan bangsa Portugis pada abad ke-16 dan kemudian melawan bangsa Belanda. Tabel 1 menampilkan sejumlah penemuan dari beberapa studi historis mengenai peran perempuan Aceh dalam proses pengambilan keputusan di masa lalu. Tabel tersebut menunjukkan sejumlah besar perempuan Aceh memegang posisi pengambilan keputusan, membuat peran aktif mereka dalam politik bukanlah suatu hal kebetulan belaka atau suatu hasil dari manipulasi politik oleh negarawan. Catatan historis lain menunjukkan bahwa:

“Perwira-perwira Belanda banyak membicarakan wanita Aceh dengan penuh rasa kagum dan hormat atas keberanian mereka. Dengan gagah berani wanita Aceh tidak pernah merasa gusar dalam mempengaruhi seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandang

sebagai kepentingan agama dan nasional. Mereka berperan dan terlibat langsung dalam peperangan 80 tahun antara Aceh dan Belanda. Atas kekaguman tersebut mereka menyebut wanita Aceh sebagai “*de grootes Dames*” (wanita-wanita agung) yang telah memainkan peranan besar dalam politik peperangan di Aceh.” (Jakobi, 1998, hal. 35)

Di halaman yang sama Jakobi juga menuliskan sebuah cuplikan yang beliau ambil dari tulisan H.M Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad seperti:

Pada masa Van der Heijden menyerang Samalanga ada wanita yang bernama Pocut Meuligo yang berhasil mempengaruhi adik laki-laknya, Teuku Chik Samalanga, untuk terus melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Cut Nyak Dien mempengaruhi suaminya, Teuku Umar, supaya balik melawan Belanda. Ini merupakan fakta sejarah bahwa keduanya pernah benar-benar terjadi. Bahkan jika digali pasti akan banyak tokoh-tokoh wanita di Aceh yang mengagumkan tekad perjuangannya seperti Cut Meutiah yang ditemukan tewas tertindih bangkai dengan Pang Nanggroe. (Jakobi, 1998, hal. 35)

Tentu saja bukti-bukti yang tersebar tentang peran perempuan Aceh di atas sebaiknya diikuti dengan analisa lebih lanjut mengenai relasi gender, Islam, dan feudalisme di Aceh. Meskipun apabila benar bahwa peran perempuan Aceh dalam proses pengambilan keputusan politik ini merupakan hasil manipulasi politik oleh laki-laki, kenyataannya adalah bahwa perempuan Aceh dapat menggunakan situasi politik tersebut mempertahankan kekuasaan mereka dalam jangka waktu lama. Perempuan Aceh memegang kekuasaan tertinggi sebagai ratu pada awal abad ke-15, dan dari pertengahan hingga akhir abad ke-17.

Pengakuan hak-hak perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik tertinggi di masa lalu, dalam konstruksi aktif tentang nasionalisme melawan penjajah Eropa, telah menjadi senjata wacana di tangan perempuan Aceh saat ini. Para Ulama Aceh kesulitan untuk menggunakan apa yang terjadi di masa lalu untuk melegitimasi kepentingan politik mereka untuk membuat perempuan Aceh berbusana dan bersikap seperti interpretasi para Ulama terhadap *syariat* Islam. Mereka tak dapat menyuruh perempuan Aceh untuk menyingkir dari cara busana modern yang menurut Amer Hamzah “dekaden” ke cara busana perempuan pendahulunya. Dari hasil wawancara terhadap Rina, ketua organisasi perempuan di Aceh, terungkap bahwa perempuan Aceh sungguh tidak memiliki kultur atau kebiasaan mengenakan jilbab. Banyak foto-foto keluarga

Tabel 1.

Daftar Perempuan Aceh dengan peran pengambil keputusan sebelum dan sesudah mulainya perang melawan Belanda pada tahun 1873

NAMA	POSISI	PERIODE	TEMPAT
Putri Lindung Bulan	Perdana Menteri	Thn 1353-1398	Kesultanan Perlak
Nihrsiyah Rawangsa Khadiyu	Ratu	Thn 1400-1428	Kesultanan Samudera Pasai
Malahayati *	Laksamana	Thn 1589-1604	Kesultanan Aceh Darussalam
Meurah Ganti *	Laksamana	Thn 1604-1607	Kesultanan Aceh Darussalam
Cut Meurah Inseuen *	Laksamana Muda	Thn 1604-1607	Kesultanan Aceh Darussalam
Taj'Al Alam	Ratu	Thn 1641-1675	Kesultanan Aceh Darussalam
Cur Nyak Keureuto*	Kepala daerah otonom (<i>Uleebalang</i>)	Thn 1641-1675	Kesultanan Aceh Darussalam
Cut Nyak Fatimah*	Kepala daerah otonom (<i>Uleebalang</i>)	Thn 1641-1675	Kesultanan Aceh Darussalam
Seri Ratu Nurul Alam Nakiatu'ddin Sjah	Ratu	Thn 1675-1678	Kesultanan Aceh Darussalam
Sultan Inayat Zakiatuddin Sjah	Ratu	Thn 1678-1688	Kesultanan Aceh Darussalam
Seri Ratu Kamalat Syah	Ratu	Thn 1688-1699	Kesultanan Aceh Darussalam
Pocut Meuligo	<i>Uleebalang</i> , penasihat perang dan jenderal di Samalanga	Akhir abad ke-18 (Thn 1857)	Selama awal perang melawan penjajahan Belanda
Tengku Fakinah	Jenderal dan Ulama, memiliki <i>dayah</i> **	Thn 1856-1933	Selama peperangan melawan penjajahan Belanda
Cut Nyak Dien	Jenderal di Aceh Barat	Wafat 8 November 1908 di pengasingan	Selama peperangan melawan penjajahan Belanda
Cut Meutia	Jenderal di Aceh Utara	Wafat 25 Oktober 1910	Selama peperangan melawan penjajahan Belanda
Pocut Baren Biheue	Jenderal di Aceh Barat	Awal abad ke-19	Selama peperangan melawan penjajahan Belanda

* Ditunjuk oleh Sultan.

** *Dayah* adalah pusat pendidikan Islam. Sumber: Alfian (1999), Hardi (1993), Hasjmy (1974), Jakobi (1998), dan Said (1961).

menunjukkan orang tua atau nenek-nenek kami tidak menggunakan penutup kepala. Malahan sebaliknya, banyak dari mereka mengenakan pakaian lengan pendek atau bahkan tanpa lengan sama sekali. Banyak dari mereka mengenakan celana longgar yang menyimbolkan kedinamisan perempuan Aceh. Pada lembaran uang Rp 10.000 pahlawan Aceh terkenal Cut Nyak Dien (wafat dalam pengasingan di Serang, Jawa Barat, pada tahun 1910) berdiri tegak dengan rambut tersisir rapi ke belakang. Cut Nyak Meutia mengatur rambutnya dengan cara berbeda. Ia pergi perang melawan Belanda dengan rambut panjang tergerai tak terikat. (Alibasjah, 1982, h. 141)

Dengan merujuk pada sejarah, perempuan Aceh dapat beradu argumen bahwa perjuangan “hak perempuan sebagai hak asasi” sekarang ini bukanlah suatu produk cara berpikir Barat yang ‘sekuler’ dan ‘dekaden’, tapi memiliki akar legitimasi dalam sejarah masyarakat Aceh itu sendiri. Perbandingan dua kumpulan naskah *Hikayat Perang Sabil*, yang ditulis pada abad ke-17 dan pada akhir abad ke-19, menunjukkan bahwa perempuan dilibatkan sebagai pelaku dalam konstruksi nasionalisme Aceh pada abad ke-17, tapi disingkirkan dalam konstruksi nasionalisme Aceh pada akhir abad ke-19. Analisa dua versi *Hikayah Perang Sabil* ini digunakan untuk memahami bagaimana wacana bekerja pada tingkat bahasa.

Di akhir tahun 2000, naskah *Hikayat Perang Sabil* mulai beredar dan didiskusikan lagi di antara orang Aceh di Banda Aceh. Perempuan tidak dilibatkan sama sekali dalam isi naskah ini. Menurut isi naskah ini, peran perempuan dinilai tidak relevan dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Yang mengejutkan, terbukti bahwa naskah ini ternyata bukan satu-satunya naskah *Hikayat Perang Sabil*. Ini adalah naskah yang ditulis pada akhir tahun 1870-an atau pada tahun 1890-an, setelah Kesultanan Aceh Darussalam runtuh akibat serangan militer bertubi-tubi dari Belanda. Menurut Fachry Ali, pada akhir tahun 1890-an, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah di Aceh, membuat kepemimpinan Sultan dan *uleebalang* runtuh untuk selamanya. Dari puing-puing kekalahan itu, muncul kepemimpinan para Ulama dalam politik. Para Ulama inilah yang merekonstruksi ideologi perang melawan penjajah Belanda. Perang melawan Belanda akhirnya berlanjut hingga tentara Jepang masuk ke wilayah tersebut pada awal tahun 1940-an. *Hikayat Perang Sabil*, yang menjanjikan surga bagi semua orang yang mati terbunuh melawan Belanda, dan neraka bagi mereka yang menolak pergi berperang, dikonstruksi oleh para Ulama. Ideologi perang berlandaskan Islam ini merupakan sarana untuk membangkitkan semangat orang Aceh yang telah menderita terus selama peperangan pada tahun 1879 dan tahun 1890-an. (Ali, 1998, h. 130-131)

Penggunaan istilah *bidadari* dalam masyarakat religius seperti Aceh (yang menyokong heteroseksualitas) menandakan bahwa naskah ini ditulis secara spesifik bagi laki-laki Aceh. Secara konsep, *bidadari* sama seperti malaikat perempuan yang kecantikannya serupa peri. Legenda mengatakan bahwa hanya sedikit laki-laki yang beruntung dapat melihat, bertemu, dan menikahi *bidadari*. Naskah ini menyatakan saat laki-laki Aceh gugur di peperangan, salah satu pahalanya adalah mereka dapat bertemu dengan *bidadari-bidadari* cantik yang akan membawa mereka kepada Allah di surga.

“Berbahagialah mereka yang gugur di peperangan
Allah mengirim *bidadari-bidadari* kepada mereka
Ketika mereka gugur dalam kebahagiaan
Bidadari-bidadari dengan cepat mendatangi mereka dan
membawa mereka ke surga

Bidadari-bidadari mencari dan melihat
Mereka melihat saudara-saudaranya terluka dalam perang *Sabil*
Ketika waktunya gugur dalam suatu kemenangan perang
Bidadari dengan cepat datang dan membawa mereka ke surga”
(Dikutip dari *Hikayat Perang Sabil yang kembali beredar tahun 2000 an*)

Istilah *bidadari* menandakan bahwa di dalam benak para Ulama hanya laki-laki yang harus pergi berperang, dan hanya laki-laki yang memegang komando di medan tempur. Naskah tahun 1870-an *Hikayat Perang Sabil* tersebut hanya menyebut partisipasi pejuang laki-laki Aceh dalam perang.

Versi lain naskah *Hikayat Perang Sabil* tahun 1870-an dapat ditemukan di Universitas Leiden, Belanda, yang secara jelas mengutarakan tujuh manfaat yang akan diberikan kepada laki-laki yang mati di perang suci (Alfian, 1999, h. 169) Sekali lagi, perempuan tidak masuk dalam naskah ini juga. Manfaat-manfaat itu adalah:

1. Allah akan mengampuni semua dosa mereka
2. Mendapat tempat dalam surga dengan pelbagai kenikmatan
3. Kuburnya menjadi luas dan ia akan sentosa di dalamnya
4. Luput dari pada bahaya kiamat
5. Didalam surga diberikan pakaian yang yang indah disertai permata-permata
6. Memperoleh istri bidadari satu mahligai berjumlah 72 orang
7. Diampuni oleh Tuhan dosa 70 kerabat dari orang yang mati syahid itu

Menurut Alfian (1999, h. 174), ada versi lain dari *Hikayat Perang Sabil* yang ditulis pada tahun 1834, yang lima puluh tahun lebih dulu ada sebelum keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam, dan perempuan bahkan sudah hilang dari naskah tersebut. Pengkompilasi dari *Hikayat Perang Sabil* ini menulis bahwa ia mengambil tulisan-tulisan ini dari Ulama terkenal Syaikh 'Abd Al-Samad al-Falimbani. Pada saat itu, pertempuran sporadis melawan Belanda telah berjalan. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian London, yang memerintahkan Belanda untuk menghargai kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, Belanda melanggar perjanjian itu dan melancarkan serangan sporadis yang memaksa Inggris untuk kembali ke meja perundingan pada tahun 1871. Di bawah perjanjian Sumatera, Belanda memperoleh kebebasannya untuk memperluas wilayahnya ke seluruh tanah Sumatera. (Alfian, 1999, h. 73-81)

Pertanyaan pertama yang muncul adalah kalau perempuan Aceh memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan dalam perang di masa lalu, mengapa mereka tidak terwakili dalam naskah-naskah *Hikayat Perang Sabil* tersebut? Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya banyak versi dari naskah *Hikayat Perang Sabil* yang terbit tahun 1870-an yang direkonstruksi dari *Hikayat Perang Sabil* yang lebih tua yang ditulis oleh para Ulama di abad ke-17. Naskah *Hikayat Perang Sabil* yang lebih tua ini digunakan untuk memotivasi laki-laki dan perempuan Aceh untuk melawan penjajah Portugis, dan secara mengejutkan perempuan dilibatkan untuk memainkan peran sentral di dalamnya.

Ada perbedaan signifikan antara dua kumpulan *Hikayat Perang Sabil* dalam hal peran perempuan. Sementara naskah *Hikayat Perang Sabil* yang lebih tua mengakui peran perempuan dalam proses mengambil keputusan dan dalam perang, yang konsisten dengan petunjuk-petunjuk sporadis yang ditunjukkan pada Tabel 1 di atas, naskah *Hikayat Perang Sabil* yang ditulis sesudahnya menghapus perempuan dari seluruh naskah. Peran perempuan bukan saja dipinggirkan, tetapi dihapus seluruhnya dari naskah tersebut.

Alfian (1999, h. 173) berpendapat bahwa *Hikayat Perang Sabil* abad ke-17 diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 1710. Ini menurut sebuah naskah *Hikayat Perang Sabil* yang ada di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Saat ini naskah tersebut dianggap sebagai naskah tertua *Hikayat Perang Sabil*, dan tidak memuat nama penulis naskah ini. Namun, pengkompilasi menjelaskan bahwa naskah ini disusun berdasar atas buku *Mukhtasar* yang mungkin ditulis oleh seorang Ulama bernama Syaikh Ahmad Ibn Musa. Berikut merupakan sejumlah paragraf yang dikutip dari *Hikayat Perang Sabil* tahun 1710 yang mengakui kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam membela Aceh dari penjajah Barat.

“Waktu kafir menduduki negeri,
semua kita wajib berperang,
Jangan diam bersunyi diri,
Didalam negeri bersenang-senang,
Diwaktu itu hukum *fardhu'ain*,
Harus yakin seperti sembahyang,
Wajib kerjakan setiap waktu,
Kalau tak begitu dosa hai abang
Tak sempurna sembahyang puasa,
Jika tak mara ke medan perang,
Fakir miskin, kecil dan besar,
Tua, muda, pria, dan perempuan,
Yang sanggup melawan kafir,
Walaupun ia budaknya orang.”
(Alfian, 1999, h. 171)

Berikut ini adalah paragraf dari versi lain *Hikayat Perang Sabil* abad ke-17 yang secara konsisten menyokong kesempatan yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan untuk membela negerinya.

“Baik wanita atau pria,
Semuanya, tua dan muda, Akil Balig, kanak-kanak, menurut *ijmak* ikut serta, Saleh, fasik, alim, jahil, wajib semua berperan serta, Raja, rakyat, *uleebalang*, wajib berperang sama rata, Kafir yang menyerang negeri kita, wajib disini lawan segera, Haram lari, wajib melawan. *Fardhu ain* ke atas kita.” (Alfian, 1999, h. 171)

Naskah *Hikayat Perang Sabil* yang lebih tua sebenarnya memperlihatkan petunjuk lain bahwa dari abad ke-17 hingga ke sebelum akhir abad ke-19, perempuan Aceh sungguh memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dan dalam medan tempur. Prof. A. Hasjmy, sejarawan dan Pemimpin Dewan Ulama Daerah Istimewa Aceh, memberikan konfirmasinya dengan mengatakan bahwa

“... di masa lalu, kesultanan Islam di Aceh memperlakukan laki-laki dan perempuan setara. Hak perempuan untuk memegang tampuk kerajaan di istana diakui secara penuh. Di bawah hukum Kesultanan Aceh Darussalam, hak-hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Begitu juga kewajiban mereka untuk membela dan membangun kesultanan.... Hak-hak dan kewajiban itu menyediakan kesempatan bagi perempuan Aceh dari

Kesultanan Perlak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam untuk ikut serta secara aktif dalam pemerintahan dan militer.”

(Kutipan dari paper Prof. A. Hasjmy berjudul “Peran Perempuan Aceh dalam Pemerintahan dan Perang” yang dipresentasikan pada tahun 1988 dalam suatu forum yang diadakan oleh Yayasan Pencinta Sejarah. Lihat Hardi, 1993, hal. 52) Kutipan di atas mengungkap sikap progresif dari Pemimpin Dewan Ulama akan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sikapnya ini terbilang langka mengingat keluar dari seorang pimpinan Ulama. Namun, kutipan berusia enam belas tahun ini dikeluarkan dalam lingkungan yang sangat berbeda. Di bawah gelombang kuat konservatisme Islam sekarang ini, kita tidak tahu apakah Prof. Hasjmy masih akan memegang pandangan yang sama atau malahan ia lebih mengadopsi pendapat bahwa relasi perempuan dan laki-laki yang sejajar di masa lalu terjadi karena Aceh belum menerapkan *syariat* Islam yang sesungguhnya.

Perbandingan kedua kumpulan *Hikayat Perang Sabil* memicu kemunculan pertanyaan menyangkut relasi antara perempuan dan para Ulama di Aceh dalam periode waktu yang berbeda dalam konstruksi makna seputar nasionalisme, relasi gender, dan Islam. Bahkan dalam abad ke-17, para Ulama telah memainkan peran yang sangat penting dalam kesultanan Islam di Aceh. Kita harus ingat bahwa kesultanan Islam yang pertama di Asia Tenggara adalah Kesultanan Perlak, yang berdiri di Bandar Perlak, di pesisir pantai Sumatera Utara, pada awal tahun 840. Dan hanya para Ulama yang mempunyai legitimasi untuk mengembangkan ideologi perang berlandaskan Islam seperti *Hikayat Perang Sabil*. Pada saat itu, pada abad ke-17, *syariat* telah ditutup untuk ditafsirkan dan ditafsirkan ulang selama kurang lebih lima abad. (Engineer, 1992, h. 6-9) Bagaimana akhirnya perempuan Aceh memainkan peran sentral dalam konstruksi nasionalisme Aceh ketika para Ulama menguasai penafsiran *syariat* Islam menjadi suatu hukum yang tidak bisa berubah?

Haruslah dilakukan investigasi historis yang cermat dan spesifik untuk memahami relasi antara kesultanan Aceh dan para Ulama yang berbeda-beda. Bisa jadi terjadi mekanisme *check and balances* - saling kontrol - antara dua kelompok sosial dan politik yang kuat dalam penafsiran ajaran-ajaran agama. Bila tidak demikian, perempuan juga akan disingkirkan dalam naskah *Hikayat Perang Sabil* abad ke-17. Benarkah bahwa kesultanan Aceh yang feodal lebih progresif dalam hal relasi gender dibandingkan dengan gerakan kemerdekaan Aceh saat ini? Benarkah bahwa hukum adat Aceh tidak mendiskriminasi perempuan? Dan pertanyaan paling penting, wacana macam apakah yang digunakan

perempuan Aceh pada saat itu yang memungkinkan mereka untuk bertarung dengan para Ulama dalam konstruksi nasionalisme? Namun, kebutuhan investigasi diskursif dan historis jelas-jelas di luar jangkauan buku ini.

Pertanyaan bagaimana perempuan disingkirkan dalam konstruksi nasionalisme Aceh pada akhir abad ke-19 lebih mudah dijawab daripada pertanyaan bagaimana perempuan disertakan dalam konstruksi nasionalisme Aceh pada abad ke-17. Pada akhir abad ke-19, keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam membuat penggalangan kesatuan nasional melawan orang asing tidak mungkin dilakukan oleh aparat negara. Agama Islam tinggal menjadi satu-satunya alat mobilisasi politik. Ini cuma tinggal satu langkah lagi dari transformasi peran perempuan dari sebagai *agen (pelaku)cy* (agen (pelaku) perubah) dalam konstruksi nasionalisme Aceh menjadi hanya suatu simbol kolektivitas Islam di Aceh. Dengan melihat pada dua kumpulan naskah *Hikayat Perang Sabil*, kita dapat melihat bahwa kedua nasionalisme pada abad ke-17 dan pada abad ke-19 dibangun melalui hubungan gender. Penyertaan dan penyingkiran perempuan merupakan elemen penting dalam konstruksi nasionalisme di Aceh pada abad ke-17 dan ke-19. Ada sebuah kesamaan antara kondisi yang dihadapi oleh orang Aceh saat ini dengan kondisi pada akhir abad ke-19. Bukannya berhadapan dengan Belanda, orang Aceh pada akhir abad ke-20 berperang melawan militer Indonesia. Untuk mengembangkan rasa kesatuan di antara orang Aceh, sekali lagi para Ulama menggunakan agama sebagai alat untuk menyatukan dan memobilisasi semangat perlawanan. Tak heran jika naskah *Hikayat Perang Sabil* abad ke-19 kembali beredar dan didiskusikan lagi di antara orang Aceh. Bukanlah pula suatu kebetulan bahwa naskah *Hikayat Perang Sabil* abad ke-17 tidak terpilih untuk dipopulerkan oleh para Ulama dan pendukungnya sekarang ini.

Analisa dua kumpulan *Hikayat Perang Sabil* di atas mengarah pada suatu hipotesis bahwa perimbangan kekuasaan yang dimainkan oleh kesultanan feodal untuk menekan kekuasaan para Ulama telah membantu mencegah munculnya diskriminasi terhadap perempuan Aceh sebelum abad ke-19. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Sukarno dan kemudian Suharto memainkan peran penyeimbang terhadap para Ulama Aceh, seperti yang dilakukan kesultanan di masa lalu. Di dalam Aceh sendiri, tidak ada kekuatan politik yang cukup kuat yang mungkin memainkan peran politik penyeimbang, baik gubernur ataupun organisasi masyarakat madani tidak memiliki legitimasi politik yang cukup kuat untuk memainkan peran penyeimbang tersebut. Namun akhir-akhir ini, seperti yang didiskusikan pada bagian Pendahuluan, pemerintah pusat Abdurrahman Wahid pada waktu itu yang menyarankan pemerintahan daerah Aceh untuk

merancang dan lalu mengeluarkan peraturan mengenai adat-istiadat, pendidikan, dan penerapan *syariat* Islam. Langkah itu diambil untuk mengurangi tuntutan orang Aceh akan kemerdekaan yang diasosiasikan dengan permintaan penerapan *syariat* Islam di Aceh.

Kita kembali mendiskusikan dilema yang dihadapi perempuan Aceh, dan kebutuhan perempuan Aceh untuk membangun wacana mereka sendiri. Wacana ini harus dapat bertarung melawan penindasan perempuan ke dalam simbol kolektivitas Islam yang dijalankan oleh tiga aktor dominan. Wacana itu harus dapat merekonstruksi nasionalisme Aceh berlandaskan Islam sehingga tidak lagi menindas perempuan. Terakhir, wacana alternatif harus dapat mengubah penafsiran maskulin atas ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya, penafsiran ulang naskah dan sejarah *syariat* Islam harus dilakukan secara terus-menerus untuk menyuarakan 'hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia' di dalam Islam. Setiap konstruksi yang mencoba menjadikan perempuan Aceh sebagai simbol kolektivitas Islam harus diubah. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penerapan *Syariat* Islam di Aceh yang disusun oleh tim bentukan Gubernur Aceh yang seluruhnya beranggotakan laki-laki (sebanyak 6 orang) harus ditolak dan direkonstruksi menurut penafsiran Islam yang menyokong kesetaraan gender. Menjadi ringkihnya makna dominan (Weedon, 1987, h. 107-108) bergantung dari kemampuan dan kegigihan perempuan Aceh untuk mempertanyakan dan melawan upaya-upaya untuk mendomestikasikan mereka.